



LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

- Rapat ke : 28 (dua puluh delapan)
Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Luar Negeri (Menlu).
- Hari, Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2017
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Sesi I:
Pembicaraan Tingkat I untuk Pembahasan RUU tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) dengan acara, yaitu:
1. Pembukaan;
2. Penjelasan Pemerintah;
3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi;
4. Pembahasan Materi RUU dan Penjelasan
- Sesi II:
Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan, yaitu:
1. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi;
2. Pendapat Akhir Pemerintah;
3. Pengambilan Keputusan terhadap RUU;
4. Penandatanganan Naskah RUU;
5. Penutup.
- Hadir : 1. ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI
a. Menteri PPPA. Prof. Dr. Yohana Susana Yembise
b. Menlu, diwakili Direktur Hukum Perjanjian Polkam, Direktorat HPI Kemenlu, Ricky Suhendar
c. Menkumham, diwakili oleh Direktur Harmonisasi I, Kemenkumham, Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.

beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 11.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri PPPA, Menlu, dan Menkumham) pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.

II. KESIMPULAN

1. Setelah mendengarkan Penjelasan Pemerintah dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak), Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.35 WIB.

Jakarta, 11 Oktober 2017

KETUA RAPAT,

TTD

Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.

A-165